MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 293 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah;

b. bahwa untuk penambahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2083 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 173 Tahun 2024 tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024; dan

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 289 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Secara Nasional Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-250/MK.02/2024 tanggal 18 Maret 2024;
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7612/B-BP.02.01/SD/K/2023 tanggal 31 Juli 2023;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kualifikasi pendidikan dan syarat jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Instansi Pemerintah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

KETIGA : Syarat jabatan bagi jabatan pelaksana untuk klasifikasi teknisi merujuk pada Lampiran III Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

KEEMPAT : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil tersebut, dilakukan oleh masing–masing Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing–masing Instansi Pemerintah.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 2 Juli 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN DXII
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 293 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. MAMASA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
A .	TENAGA KESEHATAN	20	
1.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH (UMUM)	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KONDOSAPATA | INSTALASI BEDAH SENTRAL
2.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS TAWALIAN
3.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS NOSU
4.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS MEHALAAN
5.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS BAMBANG
6.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS TABANG
7.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS MALABO
8.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SALUTAMBUN
9.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS PANA
10.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS TABULAHAN
11.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS BUNTU MALANGKA
12.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS MAMBI
13.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS MAMASA
14.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS MESSAWA
15.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS ARALLE
16.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SUMARORONG
17.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS TABANG
18.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS TABULAHAN
19.	RADIOGRAFER TERAMPIL	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KONDOSAPATA | SEKSI PELAYANAN | INSTALASI RADIOLOGI
20.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS MESSAWA

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
B.	TENAGA TEKNIS		70	
1.	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	D-IV DESTINASI PARIWISATA ; S-1 PARIWISATA ; S-1 KEWIRAUSAHAAN ; S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PARIWISATA | BIDANG PEMASARAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
2.	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	S-1 PARIWISATA ; D-IV BISNIS DIGITAL PARIWISATA ; D-IV DESTINASI PARIWISATA ; S-1 KEWIRAUSAHAAN	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PARIWISATA | BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
3.	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN I PEMERINTAHAN | BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
4.	ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK GEOLOGI ; D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | BIDANG PECEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
5.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
6.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN I PEMERINTAHAN | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | BIDANG PERTANAHAN
8.	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN ; S-1 ILMU PANGAN ; S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN ; S-1 AGRIBISNIS ; S-1 GIZI ; S-1 GIZI MASYARAKAT	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KETAHANAN PANGAN | BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
9.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | BIDANG AKUNTANSI
10.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | BIDANG PERBENDAHARAAN
11.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | BIDANG PENDAPATAN
12.	ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN AHLI PERTAMA	D-IV PERIKANAN ; S-1 PERIKANAN	2	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PERIKANAN | BIDANG PERIKANAN
13.	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 AGRIBISNIS ; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN ; S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PERTANIAN | BIDANG HORTIKULTURA
14.	ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 DESAIN PRODUK ; S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | BIDANG PERDAGANGAN
15.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN III ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
16.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 INFORMATIKA ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | BIDANG MUTASI DAN PROMOSI
17.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV KEARSIPAN ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 KEARSIPAN	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | BIDANG KEARSIPAN
18.	ASISTEN PERPUSTAKAAN TERAMPIL	D-III PERPUSTAKAAN ; D-III PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ; D-III PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ; D-III TEKNIK PERPUSTAKAAN, DOKUMENTASI DAN INFORMASI ; D-III PERPUSTAKAAN, INFORMASI, DAN KEARSIPAN	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | BIDANG PERPUSTAKAAN
19.	AUDITOR AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI ; D-IV MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 HUKUM ; S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | INSPEKTORAT
20.	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH 1
21.	MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA	PROFESI DOKTER HEWAN	2	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PERTANIAN | BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
22.	PARAMEDIK VETERINER TERAMPIL	D-III KESEHATAN HEWAN ; D-III KESEHATAN TERNAK ; D-III PARAMEDIK VETERINER ; D-III TEKNISI MEDIS VETERINER ; D-III TEKNIK REPRODUKSI SATWA	2	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PERTANIAN | BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
23.	PELATIH OLAHRAGA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN ; S-1 MANAJEMEN OLAHRAGA ; S-1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA ; S-1 REKAYASA KEOLAHRAGAAN ; S-1 SAINS KEOLAHRAGAAN	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
24.	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 PLANOLOGI ; D-IV PLANOLOGI ; S-1 GEOLOGI ; D-IV GEOLOGI ; D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN ; D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG BINA MARGA
25.	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR ; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ; D-IV DESAIN INTERIOR ; D-IV PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN ; D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; D-IV PLANOLOGI ; D-IV TEKNIK PLANOLOGI ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 PLANOLOGI ; S-1 RANCANG KOTA ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
26.	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ARSITEKTUR ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN BENCANA ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
27.	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
28.	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR ; D-IV PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KOTA ; D-IV PERENCANAAN WILAYAH ; D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; D-IV PLANOLOGI ; D-IV TEKNIK SIPIL ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PLANOLOGI ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAAN
29.	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	S-1 ARSITEKTUR ; S-1 PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PLANOLOGI ; S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG TATA RUANG
30.	PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI PERTAMA	D-IV PETERNAKAN ; D-IV TEKNOLOGI PETERNAKAN ; S-1 BUDI DAYA PETERNAKAN ; S-1 PENYULUH PETERNAKAN ; S-1 ILMU PETERNAKAN ; S-1 TEKNOLOGI HASIL TERNAK	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PERTANIAN | BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
31.	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 AGROBISNIS ; S-1 AGROTEKNOLOGI ; S-1 AGRONOMI ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN ; S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN ; S-1 AGROEKOTEKNOLOGI	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PERTANIAN | BIDANG TANAMAN PANGAN
32.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | INSPEKTORAT
33.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN II PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
34.	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN ; D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR ; S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA AIR ; S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN ; S-1 REKAYASA SUMBER DAYA AIR ; S-1 TEKNIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR ; S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR
35.	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK KIMIA ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU LINGKUNGAN ; S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN ; S-1 SANITASI LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP
36.	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN AHLI PERTAMA	S-1 AGROEKOTEKNOLOGI (MINAT PERLINDUNGAN TANAMAN / HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) ; S-1 AGROTEKNOLOGI (MINAT PERLINDUNGAN TANAMAN / HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) ; S-1 AGRONOMI ; S-1 BIOLOGI ; S-1 HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN ; S-1 PERLINDUNGAN TANAMAN ; S-1 PROTEKSI TANAMAN	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PERTANIAN | BIDANG PERKEBUNAN
37.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PSIKOLOGI ; D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA | BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN SARANA PRASARANA DESA
38.	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	D-IV AGRO BISNIS HORTIKULTURA ; D-IV PENYULUH PERTANIAN ; S-1 AGRIBISNIS ; S-1 BUDIDAYA PERTANIAN ; S-1 ILMU TANAH ; S-1 PENYULUHAN PERTANIAN ; D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PERTANIAN | BIDANG PENYULUHAN | BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) KECAMATAN MAMASA
39.	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	D-IV AGRO BISNIS HORTIKULTURA ; D-IV PENYULUH PERTANIAN ; D-IV SOSIAL EKONOMI PERTANIAN ; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN ; D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN ; S-1 AGROTEKNOLOGI ; S-1 BUDIDAYA PERTANIAN ; S-1 ILMU TANAH ; S-1 TEKNIK PERTANIAN	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PERTANIAN | BIDANG PENYULUHAN | BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) KECAMATAN BUNTUMALANGKA
40.	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	D-IV PENYULUH PERTANIAN ; D-IV AGRO BISNIS HORTIKULTURA ; D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN ;	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		S-1 AGRIBISNIS ; S-1 AGRIBISNIS HORTIKULTURA ; S-1 AGROEKOTEKNOLOGI ; S-1 AGRONOMI ; S-1 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA ; S-1 AGROTEKNOLOGI ; S-1 BUDIDAYA PERTANIAN ; S-1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN ; S-1 ILMU HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN ; S-1 ILMU TANAH ; S-1 PENYULUHAN PERKEBUNAN ; S-1 PERKEBUNAN		PERTANIAN | BIDANG PENYULUHAN | BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) KECAMATAN SESENAPADANG
41.	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 BUDIDAYA PERTANIAN ; D-IV PENYULUH PERTANIAN ; S-1 PENYULUHAN PERTANIAN ; S-1 AGROEKOTEKNOLOGI ; S-1 AGROTEKNOLOGI ; S-1 AGRONOMI ; S-1 AGRIBISNIS HORTIKULTURA ; S-1 TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA ; S-1 TEKNIK PERTANIAN	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PERTANIAN | BIDANG PENYULUHAN | BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) KECAMATAN NOSU
42.	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL ; D-IV REHABILITASI SOSIAL ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS SOSIAL | BIDANG REHABILITASI SOSIAL
43.	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN I PEMERINTAHAN | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
44.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN I PEMERINTAHAN | BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
45.	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH | SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM
46.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; D-IV AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN | SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN | SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN, DAN PELAPORAN
47.	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN OLAHRAGA	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
48.	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 PLANOLOGI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 TEKNIK PLANOLOGI	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH | SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN
49.	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; D-IV KOMUNIKASI MASSA	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN III ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER
50.	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMUNIKASI ; D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 JURNALISTIK	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN | BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI PUBLIK
51.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN II PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM
52.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | BIDANG PENGADAAN, PENSIUN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN
53.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN | SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN
54.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | SEKRETARIAT BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
55.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN III ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
56.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN III ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
57.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN | BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA
58.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN II

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI		PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
59.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | BIDANG PENILAIAN KINERJA, DISIPLIN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
60.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN
61.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN III ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
62.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN II PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PEREKONOMIAN
63.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN I PEMERINTAHAN | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
64.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KONDOSAPATA | TATA USAHA
65.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
66.	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III MANAJEMEN ; D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI ; D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA ; D-III MANAJEMEN INFORMATIKA ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
67.	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III KESEKRETARIATAN ; D-III MANAJEMEN ; D-III MANAJEMEN PERKANTORAN ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN III ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BHINNEKA TUNGGAL IKA
panrb